

# MEDIA KEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

## UMPAN JITU AKSELERASI INVESTASI

---

Peran vital investasi untuk mendorong perekonomian tiada disangsikan. Beragam strategi pun dilancarkan. Tak hanya agar Indonesia menjadi tempat tujuan, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi ekonomi demi masa depan lebih cemerlang.



# Daftar Isi



## COVER STORY:

Investasi dan ekspor menjadi salah satu kunci untuk mengurangi defisit transaksi berjalan. Berbagai kebijakan pemerintah diberikan sebagai umpan untuk memancing peningkatan ekspor dan investasi. Kebijakan itu kami gambarkan dengan sebuah umpan.

**MEDIA KEUANGAN** adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

**MEDIA KEUANGAN** saat ini dapat diunduh melalui



App Store



Google Play



## Foto Cover:

Anas Nur Huda

## 5 DARI LAPANGAN BANTENG

## 6 EKSPOSUR

## LAPORAN UTAMA

- 8 Ragam Prakarsa Seimbangkan Neraca
- 12 Berbenah Pacu Investasi
- 16 Infografis
- 18 Gerak Bersama Lambungkan Indonesia
- 20 Menyemai Tekad Berkompetisi

## PHOTO STORY

- 22 Kelola Sawit Jadi Duit

## TEKA TEKI

- 22 Teka Teki Medkeu

## WAWANCARA

- 25 Menerobos Keterbatasan

## POTRET KANTOR

- 28 Menuai Berkah Hijrah

## FIGUR

- 32 Amanah Sepanjang Hayat Sang Penakar Manfaat

## BUGAR

- 35 Leptospirosis, Penyakit Mematikan Saat Banjir Datang

## OPINI

- 36 Dana BOS Disalurkan Langsung ke Sekolah

## UANG KITA BUAT APA

- 38 Anggaran Pendidikan Demi Masa Depan

## OPINI

- 40 Masa Depan Batu Bara dan Energi Terbarukan

## GENERASI EMAS

- 42 Karena Engkau Muda

## LOKAL

- 44 Kain Sesek, Tenun Khas Lombok

## FINANSIAL

- 46 Middle Income Trap

**Diterbitkan oleh:** Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti. **Pemimpin Redaksi:** Kabag Manajemen Publikasi, Rahmat Widiana. **Redaktur Pelaksana:** Yani Kurnia A. **Dewan Redaksi:** Ferry Gunawan, Dianita Sulastuti, Titi Susanti, Budi Sulistyono, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Riza Almanfaluthi, Alit Ayu Meinarsari, Adelia Surya Pratiwi, Hadi Surono, Fitriyani, Budi Sulistyono. **Tim Redaksi:** Reni Saptati D.I., Danik Setyowati, Abdul Aziz, Dara Haspramudilla, Dimach Oktaviansyah Karunia Putra, Aditya Wirananda, CS. Purwowidhu Widayanti, Rostamaji, Adik Tejo Waskito, Rizmy Otlani Novastria, Ferdian Jati Permana, Andi Abdurrochim, Mahardhika Argha Mariska, Kurnia Fitri Anidya, Sajidah Putri, Muhammad Irfan, Retyen Laksita Mutiary, Nur Iman, Berliana Oktoviani, Nur Zahratul Jannah. **Redaktur Foto:** Anas Nur Huda, Resha Aditya Pratama, Andi Al Hakim, Seno Adi Nugroho, Paruhum Aurora Sotarduga Hutauruk, Intan Nur Shabrina, Ichsan Atmaja, R. Andra Fahreza, Sugeng Wistriono, Rezky Ramadhani, Arif Taufiq Nugroho, Shanti Sukmawati. **Desain Grafis dan Layout:** Venggi Obdi Ovisa, Ditto Novenska. **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediageuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepiantasnya.

MENARIK INVESTASI

# Mengungkit Pertumbuhan

**A**wal tahun 2020, kondisi global masih diwarnai dengan ketidakpastian. Mulai dari *deadlock* perundingan perdagangan AS dan China, rencana Brexit, hingga wabah virus Corona di beberapa negara. Semua kejadian tersebut berpotensi mengganggu perekonomian global dan pada akhirnya juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Asia, termasuk Indonesia.

Meskipun 2020 dipenuhi dengan dinamika gejolak global, pengalaman di 2019 memberikan sinyal bahwa Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonominya. Angka kemiskinan berkurang, pengangguran menurun, indeks *gini ratio* pun juga menurun. Hal ini membuktikan bahwa

Indonesia memiliki modal besar untuk menumbuhkan iklim investasi yang baik.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Indonesia telah menyiapkan berbagai kebijakan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional termasuk strategi mengurangi defisit neraca perdagangan. Salah satu kunci mengurangi defisit tersebut adalah dengan menumbuhkan investasi dalam negeri. Perhatian pemerintah terhadap upaya peningkatan iklim investasi di Indonesia sangatlah serius. Berbagai insentif fiskal telah disiapkan pemerintah, seperti *tax allowance*, *super deduction*, hingga *tax holiday*.

Tak berhenti di situ, mulai tahun 2020 pemberian Dana Insentif Daerah (DID) menggunakan indikator peningkatan investasi dan ekspor

dalam pengalokasiannya. Kemudahan-kemudahan tersebut semata-mata dimaksudkan untuk menggenjot investasi dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Tentunya, tanggung jawab untuk mendorong investasi menjadi pekerjaan bersama antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, khususnya dalam mendukung kemudahan berinvestasi dan memperkuat daya saing daerah. Dalam edisi ini, berbagai hal tentang usaha dan tantangan akselerasi investasi dalam negeri akan disajikan. Selamat membaca!

**Rahmat Widiana,**  
Pemimpin Redaksi Media Keuangan

**Ralat:**

Redaksi memohon maaf atas kesalahan pencantuman foto narasumber atas nama Suminto, Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan dalam artikel "Menghelat Program Kaya Manfaat" pada edisi "Mewujudkan Perlindungan Memadai" Volume XV/No. 149/Februari 2020.



Majalah Media Keuangan  
@majalahmediakeuangan

Dari beberapa faktor ini, mana yang paling besar mendorong investasi?  
a. Potensi demografi  
b. Melimpahnya SDA  
c. Perbaikan birokrasi  
d. Pembangunan Infrastruktur

@nurhafsahasanb  
Indonesia terlalu kaya SDA sampai dilirik banyak negara. Yang lain saja peka dengan SDA kita, masa kita tidak? Yok sadar, yok!

@galuhmafela  
Pembangunan infrastruktur, meski hasilnya belum bisa dinikmati sekarang jika belum dilakukan berkesinambungan.

@atri.widi  
Perbaikan birokrasi yg memudahkan investasi, misal penanaman modal 1 pintu. Investor tidak merasa ribet lagi untuk investasi, selain mengurangi cost penanaman modal

## Revisi Informasi Kinerja #KiniMakinMudah

semua di SatuDJA

[satudja.kemenkeu.go.id](http://satudja.kemenkeu.go.id)



Sasaran Strategis . Indikator Sasaran Strategis  
Program. Sasaran Program. Indikator Sasaran Program  
Kegiatan. Sasaran Kegiatan. Indikator Sasaran Kegiatan  
Output. Indikator Output  
Sub Output. Komponen

ditjenanggaran

021-3868085

Anggaran Kemenkeu

pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id

[www.anggaran.kemenkeu.go.id](http://www.anggaran.kemenkeu.go.id)

# Lapangan Menuju Kemenangan

Foto  
Agus Tri Hananto

Teks  
Anas Nur Huda

**S**tadion Manahan Solo merupakan salah satu kandidat sebagai venue pesta sepak bola terbesar dunia. Pertama kali dalam sejarah Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-21 2021. Stadion tersebut telah selesai direnovasi dan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu 15 Februari 2020. Biaya renovasi stadion ini menghabiskan anggaran Rp301 miliar.

# Ragam Prakarsa Seimbangkan Neraca

Teks Dara Haspramudilla

*Selama ini, kinerja transaksi berjalan Indonesia mengalami pasang naik dan pasang surut. Selama beberapa tahun defisit transaksi berjalan menjadi pekerjaan rumah yang terus diupayakan untuk dirapikan. Pemerintah pun serius berikhtiar untuk mendongkrak neraca menjadi surplus. Optimisme pun bergelora dalam membereskan masalah defisit dalam tiga hingga empat tahun ke depan. Transformasi ekonomi pun menjadi jalan untuk meniadakan defisit transaksi berjalan.*

**S**ejatinya, mengalami defisit transaksi berjalan bagi sebuah negara berkembang seperti Indonesia bukanlah suatu dosa. Selama dalam batasan yang aman, defisit transaksi berjalan sudah menjadi bagian dari tantangan perekonomian. Namun demikian, defisit transaksi berjalan bisa menjadi tantangan bagi tumbuhnya perekonomian sebab ia adalah cerminan tidak imbangnya penerimaan dan pengeluaran dari transaksi ekonomi lintas negara.

Untuk itulah serangkaian kebijakan dirancang agar neraca menjadi setimbang. Peningkatan kinerja ekspor dan pengurangan ketergantungan impor menjadi strategi agar defisit transaksi berjalan dapat terkendali. Percepatan peningkatan masuknya aliran penanaman modal, pemberian insentif fiskal untuk peningkatan ekspor, dan penerapan energi terbarukan menjadi strategi pemungkas pemerintah menekan defisit transaksi berjalan.

## Akselerasi Investasi Jadi Kunci

Defisit transaksi berjalan erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, melebarnya defisit transaksi berjalan tentu

Tingginya impor bahan bakar migas menjadi penyumbang terbesar dalam defisit transaksi berjalan

Foto Resha Aditya

## Tantangan dan hambatan dalam mendorong investasi di sektor riil



Dari total proyek terkendala perizinan dan rekomendasi



Dari total proyek terkendala lahan



Dari total proyek terkendala regulasi



Dari total proyek terkendala insentif fiskal



Dari total proyek terkendala isu lainnya

saja akan merintang laju pertumbuhan ekonomi. Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani, sektor konsumsi perlu dijaga sebab mendominasi postur pertumbuhan ekonomi nasional.

“Memang kita harus tetap menjaga terutama konsumsi domestik kita yang memiliki kontribusi 55-56 persen dari total pertumbuhan kita,” tutur Rosan.

Dengan demikian, meningkatkan pertumbuhan konsumsi domestik menjadi jalan penyelamatan. Lalu bagaimana cara untuk mendorong pertumbuhan konsumsi domestik? Akselerasi investasi adalah jawabannya.

Menurut Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi adalah pahlawan yang menjaga kedaulatan ekonomi bangsa.

“Ketika membicarakan konsumsi, tentu saja berhubungan dengan daya beli. Daya beli ini tidak terlepas dari soal kepastian pendapatan. Kepastian pendapatan bisa terwujud jika tersedia lapangan pekerjaan. Nah, investasi menjadi satu-satunya jalan untuk menciptakan lapangan pekerjaan,” terang Bahlil.

Hal senada juga diungkapkan oleh Rosan P. Roeslani, Ketua Umum Kadin Indonesia. Menurutnya, investasi memegang peranan besar dalam menekan defisit transaksi berjalan hanya saja belum berjalan optimal.

“Jika kita lihat, investasi meningkat dari tahun ke tahun tapi belum optimal. Kadin melihat perlunya meningkatkan peran investasi terutama investasi yang berorientasi ekspor,” ujar Rosan.

Saat ditanyakan strategi BKPM dalam mendukung pemerintah menekan defisit transaksi berjalan, Bahlil mengungkapkan ada tiga langkah yang akan dilakukan. Pertama, menarik investasi untuk produk-produk substitusi impor. Kedua, mendorong investasi yang memiliki *output* produk ekspor. Ketiga, memanfaatkan investasi agar mampu menciptakan lapangan

kerja sebesar-besarnya.

“Saat ini kita sedang mendorong investasi di sektor-sektor produktif, manufaktur, padat karya yang mampu banyak menciptakan lapangan pekerjaan, yang banyak melahirkan substitusi impor dan yang berorientasi ekspor,” ungkap pria kelahiran Banda ini.

Namun demikian, masih ada beberapa aspek yang menghambat masuknya investasi ke Indonesia. Untuk itu, pembenahan internal terutama birokrasi yang berbelit menjadi fokus BKPM.

“Pengusaha itu butuh kepastian, kemudahan, dan efisiensi, jika tiga itu sudah didapatkan selesai sudah urusan. Maka dari itu, melalui Inpres Nomor 7 Tahun 2019, seluruh kewenangan terkait perizinan yang ada pada 22 Kementerian dan Lembaga didelegasikan ke BKPM. Harapannya adalah memotong mata rantai birokrasi yang terlalu panjang,” tegasnya.

Bahlil menambahkan bahwa persepsi investasi tidak hanya dari pengusaha kelas kakap saja namun juga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“BKPM tidak hanya memfasilitasi pengusaha kelas besar namun juga selama usaha tersebut bermanfaat bagi masyarakat terutama dalam menyediakan lapangan pekerjaan,” jelasnya.

### Orientasi Ekspor Harus Berubah

Selain investasi, strategi lain yang perlu dilakukan dalam mengatasi defisit transaksi berjalan adalah melalui peningkatan kinerja ekspor. Rosan berharap pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan inisiatif yang dapat mendorong ekspor dan berimplikasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

“Pada tahun 2019, *current account deficit* kita membaik sedikit. Namun, itu bukan karena ekspor yang meningkat tapi ekspor turun dan



Pemerintah Daerah turut berpartisipasi menjalankan beberapa program untuk mendorong ekspor dari industri kecil dan menengah.

Foto Resha Aditya

impor turunnya lebih banyak lagi. Jadi kita harus melihat dari semua sisi dan diharapkan pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan inisiatif yang mencoba untuk meningkatkan pertumbuhan kita ke depan,” jelasnya.

Menurut pria yang juga merupakan *chairman* Recapital Group ini, sebagai salah satu ujung tombak dalam pertumbuhan ekonomi, kinerja ekspor Indonesia harus dioptimalkan dengan cara mengubah orientasi ekspor, melakukan diversifikasi negara, dan juga diversifikasi produk.

“Kita harus aktif membuka pasar-pasar baru yang berpotensi seperti pasar di Timur Tengah, pasar-pasar di Afrika yang memang mulai digarap oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, bukan hanya pasar-pasar tradisional seperti Jepang, Korea, US, Eropa. Kita harus melakukan diversifikasi negara dan juga diversifikasi produk. Itu yang harus kita lakukan ke depannya,” ujarnya.

Bahlil juga mengungkapkan bahwa sejak masa VOC hingga tahun 2018, komoditas ekspor

Indonesia tidak banyak mengalami perubahan yakni barang mentah.

“Pola ini harus diubah. Maka dari itu, sekarang pemerintah menggiring semua sumber daya alamnya itu untuk dilakukan hilirisasi. Sebagai contoh, ketika sawit kita di-*banned* oleh Eropa beberapa waktu lalu. Namun, karena kreativitas kita dapat melahirkan B20 dan B30. Bagi petani hal ini mendatangkan keuntungan karena harga sawit menjadi tinggi dan bagi negara juga mendapat keuntungan karena impor berkurang,” pungkasnya.

### Energi Terbarukan adalah Keniscayaan

Tingginya impor bahan bakar migas menjadi penyumbang terbesar dalam defisit transaksi berjalan. Oleh sebab itu, pengembangan energi terbarukan (EBT) menjadi salah satu solusi agar defisit teratasi. Pilihan jatuh kepada minyak sawit mentah (CPO).

“Sawit kita cukup banyak, CPO nya juga berlimpah. Industri sawit sudah berkembang bisnisnya dan *supply chain* nya

sudah tertata baik. Selain itu, kita juga menguasai teknologinya, sehingga untuk hilirisasi sawit, CPO diolah menjadi biodiesel yang dapat digunakan sebagai bahan bakar *complimentary solar*,” terang Andriah Feby Misna, Direktur Bioenergi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Peningkatan kemandirian energi dan penyediaan energi ramah lingkungan merupakan tujuan utama dari pemanfaatan biodiesel sebagai bagian dari energi baru terbarukan.

“Saat ini rata-rata penggunaan BBM solar kurang lebih 33 juta kiloliter per tahun. Mengacu kepada Kebijakan Energi Nasional, harapannya di tahun 2025 nanti sekitar 13,8 juta kiloliter bahan bakar kita berasal dari bahan bakar nabati. Dengan adanya perkembangan teknologi seperti *co-processing* dan *stand alone* untuk *green refinery*, tidak menutup kemungkinan pemanfaatan bahan bakar nabati bisa melebihi target yang ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional,” ungkap Feby.

Upaya untuk meningkatkan kemandirian energi terus berlanjut. Pekerjaan rumah yang masih menanti adalah mencari pengganti gasolin. Hal ini disebabkan impor gasolin menjadi masalah impor migas terbesar saat ini.

“Untuk solar sebenarnya kita sudah bisa dikatakan selesai. Pekerjaan rumah kita saat ini ada di gasolin yang masih impor sebesar 60 persen. Jadi, nantinya CPO juga akan dikembangkan untuk pembuatan *green gasolin* dan juga *green avtur*,” jelasnya.



Pemerintah memberikan insentif fiskal untuk menopang target pertumbuhan ekonomi, khususnya untuk ekspor dan investasi.

Foto  
Anas Nur  
Huda

## Berbenah Pacu Investasi

Teks Reni Saptati D.I,

**T**iga puluh tiga perusahaan hengkang dari Tiongkok akibat perang dagang. Tiada satu pun berlabuh di Indonesia. Mereka lebih melirik negeri tetangga: Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Mengapa? Rumput tetangga lebih hijau bukan fatamorgana. Nyatanya, kita memang perlu berbenah diri. Namun, memacu investasi tak seringan membalik telapak tangan. Pembinaan tata kelola investasi perlu sinergi serta menyeluruh. Pusat dan daerah harus bergerak

bersama seirama.

Berbenah butuh keuletan dan kesabaran. Apalagi jika banyak persoalan menumpuk sekian lama, mulai dari sisi perizinan, prosedur, hingga implementasi di lapangan. Beragam regulasi yang menghambat harus segera dirapikan. Untuk memancing masuknya investasi baru dan mendorong aktivitas dunia usaha, pemerintah memasang strategi pemberian insentif fiskal.

Insentif fiskal memang akan berpengaruh negatif bagi penerimaan perpajakan karena memunculkan belanja perpajakan (*tax loss*). Akan tetapi, pemberian insentif diharapkan dapat melambungkan penerimaan perpajakan karena basis perpajakan yang semakin besar akibat peningkatan aktivitas perekonomian.

Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal Rofyanto menuturkan, sejak tahun 2018 Kementerian Keuangan telah melaporkan besarnya belanja perpajakan sebagai bentuk transparansi fiskal. Pada tahun itu, diestimasi besar belanja perpajakan mencapai Rp221,1 triliun atau sekitar 1,49 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

“Perlu disadari bahwa dampak langsung dan dampak tidak langsung dari insentif perpajakan memiliki perbedaan waktu atau *time lag*,” jelas Rofyanto. Dampak langsung dapat dirasakan pada sistem perpajakan berupa penurunan pajak yang dikumpulkan,

sedangkan dampak tidak langsung berupa peningkatan aktivitas perekonomian dapat dirasakan dalam jangka waktu menengah dan panjang.

Dalam kesempatan berbeda, Direktur Riset CORE, Piter Abdullah Redjalum menilai wajar langkah pemerintah memberikan insentif fiskal untuk menopang target pertumbuhan ekonomi, khususnya untuk ekspor dan investasi sebagai penyumbang terbesar kedua dan ketiga PDB nasional. Apalagi pada saat yang bersamaan, dalam dua tahun terakhir kinerja ekspor dan investasi tak begitu menggembirakan.

Namun demikian, Piter menekankan perlunya menempatkan insentif fiskal dalam konteks strategi besar untuk memperbaiki struktur ekonomi agar tidak lagi bergantung pada komoditas. “Karena sifat reformasi struktural jangka panjang, arah kita pasti jangka panjang. Saya kira dalam kurun waktu lima tahun sudah bisa terlihat hasilnya,” ujarnya.

### Paradigma baru

Insentif fiskal yang diberikan pemerintah beragam jenisnya. Secara garis besar, terang Rofyanto, insentif tersebut terbagi menjadi dua bagian. Pertama, fasilitas yang bersifat sektoral, antara lain *tax holiday*, *tax allowance*, *investment allowance*, fasilitas PPN tidak dipungut, dan pembebasan bea masuk. Fasilitas ini ditargetkan untuk sektor-sektor tertentu, misalnya tax



**“Karena sifat reformasi struktural jangka panjang, arah kita pasti jangka panjang. Saya kira dalam kurun waktu lima tahun sudah bisa terlihat hasilnya”**

Piter Abdullah Redjalum  
Direktur Riset Center  
of Reform on Economic  
CORE Indonesia

holiday untuk penanaman modal industri pionir.

Kedua, fasilitas yang bersifat *spatial* (kawasan), misalnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan tempat penimbunan berikat. Di dalam kawasan tersebut, sarana dan prasarana untuk pengembangan industri diintegrasikan, termasuk pemberian fasilitas perpajakan. Pemberian fasilitas spasial ini diharapkan mampu menciptakan kantong-kantong ekonomi baru.

“Dalam tahun 2019, pemerintah juga memperkenalkan jenis insentif baru, yaitu fasilitas *super deduction tax* yang merupakan *activity-based incentive* dan banyak diadopsi oleh negara-negara maju,” tambah Rofyanto. Insentif ini diberikan terhadap kegiatan vokasi dan R&D oleh Wajib Pajak (WP). Swasta didorong untuk turut aktif

## Kriteria Utama DID 2020



Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda Wajar Tanpa Pengecualian



Penetapan Perda mengenai APBD tepat waktu



Pelaksanaan e-government tepat waktu



Ketersediaan pelayanan terpadu satu pintu

mengembangkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pelatihan kerja.

Menariknya, pemberian insentif fiskal tersebut dibarengi dengan lahirnya dua paradigma baru. Pertama, *simplicity and certainty* yang menekankan pada kemudahan prosedur, tetapi aturan main dibuat sejelas mungkin. Kedua, *trust and verify* yang menekankan kepercayaan lebih besar kepada WP melalui kemudahan prosedur dan implementasi. "Namun, demi menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan, pemerintah akan turun untuk melakukan post audit," Rofyanto melengkapi.

Kedua paradigma baru itu sejalan dengan semangat pembenahan tata kelola investasi yang saat ini sedang dilakukan pemerintah. Melalui Inpres Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, mulai 3 Februari 2020 kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk insentif fiskal dari Kementerian Keuangan, didelegasikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Terkait pendelegasian kewenangan tersebut, Rofyanto menyatakan pihaknya mendorong penggunaan *Online Single Submission (OSS)* yang dikelola BKPM sebagai media untuk pemrosesan pemberian insentif fiskal. Menurutnya, selain memudahkan WP, Kementerian Keuangan juga akan dimudahkan dalam mengakses data tersebut ketika dibutuhkan. "Namun demikian, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kemudian pengalihan tersebut dapat dirumuskan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dan ketidakpastian ke depan bagi WP," tutur Rofyanto.

### Pemerintah Daerah berperan penting

Upaya menarik investasi dan meningkatkan ekspor kini menjadi prioritas nasional. Berbagai kementerian dan lembaga intens berkoordinasi untuk mengangkat peringkat *Ease of Doing Business* Indonesia yang stagnan di urutan 73. Keterlibatan pemerintah daerah dalam proses kemudahan berinvestasi tentu sangat tak terhindarkan. Pada era desentralisasi, peran pemda sangat vital lantaran kebijakan nasional yang dirumuskan pemerintah pusat akan bersinggungan dengan kewenangan pemda.

Untuk memacu pemda turut berlomba-lomba

membangun iklim investasi yang kondusif di daerahnya dan meningkatkan jumlah ekspor komoditas, Kementerian Keuangan menambahkan kriteria baru dalam pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID) 2020. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti menjelaskan selama ini DID dialokasikan kepada daerah berdasarkan kriteria utama dan kategori kinerja. Setiap tahun dilakukan rivi, termasuk penggunaan kriteria utama dan kategori kinerja sebagai dasar penilaian.

"Selain rivi, perubahan kriteria dilakukan dengan mempertimbangkan target capaian dari prioritas nasional. Sebagai contoh, untuk pengalokasian DID 2020, terdapat kategori kinerja yang baru, yaitu peningkatan ekspor dan peningkatan investasi yang menjadi prioritas nasional," ungkapnya. Astera menambahkan, ke depannya pihaknya akan terus mencari faktor-faktor apa saja yang betul-betul menjadi trigger untuk perbaikan daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Astera, skema insentif ini sangat bagus lantaran mendorong daerah melaksanakan kebijakan dengan performance terbaiknya. Ia mengatakan DID dimaksudkan untuk mendorong daerah supaya memiliki tata kelola yang semakin baik dan transparan, serta tahu posisinya dalam skala nasional. "Saya lihat dampaknya positif. Terutama buat kepala daerah yang punya *passion* sangat tinggi untuk mengembangkan daerahnya," tutupnya.



KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO



# SUKUK RITEL SERI SR012

untuk Indonesia Unggul



sukuk ritel

#InvestasiRakyatPenuhManfaat



Masa Penawaran  
24 Feb - 18 Mar 2020



Kupon 6,30% p.a.  
(fixed rate)



Minimum Pemesanan  
Rp1 juta



Dapat diperdagangkan



Pilih Mitra Distribusi Anda!



Informasi lebih lanjut:



DJPPRKemenkeu



DJPPRKemenkeu



djpprkemenkeu



@DJPPRKemenkeu

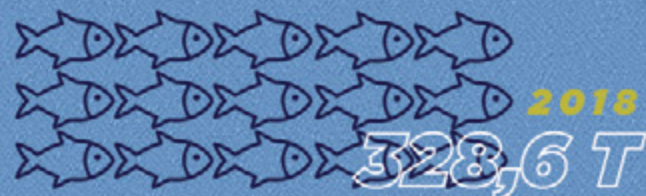
www.kemenkeu.go.id/sukukritel



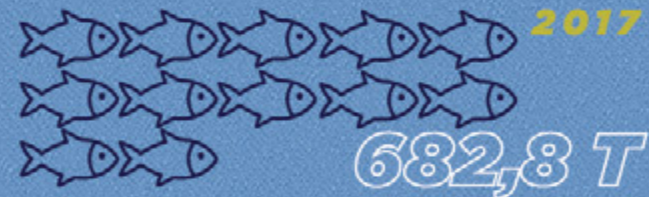
# Potensi Iklim Investasi Indonesia

Indonesia memiliki daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya. Daya Tarik tersebut diantaranya potensi demografi penduduk, melimpahnya sumber daya alam, upaya perbaikan birokrasi, dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah pun berkomitmen untuk terus mendorong perbaikan iklim investasi dan juga meningkatkan kinerja ekspor melalui berbagai kebijakannya.

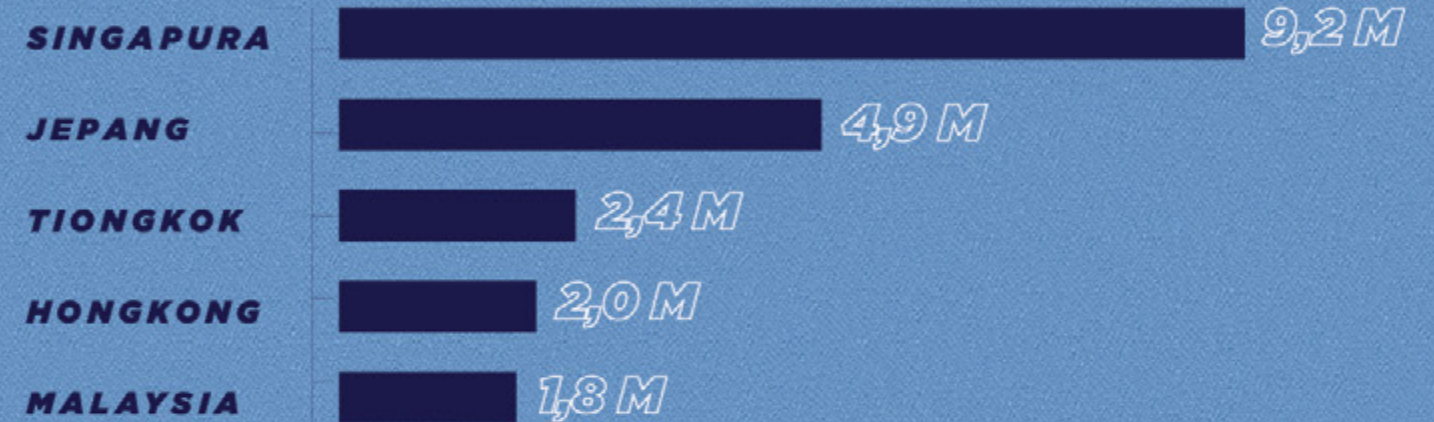
## Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)



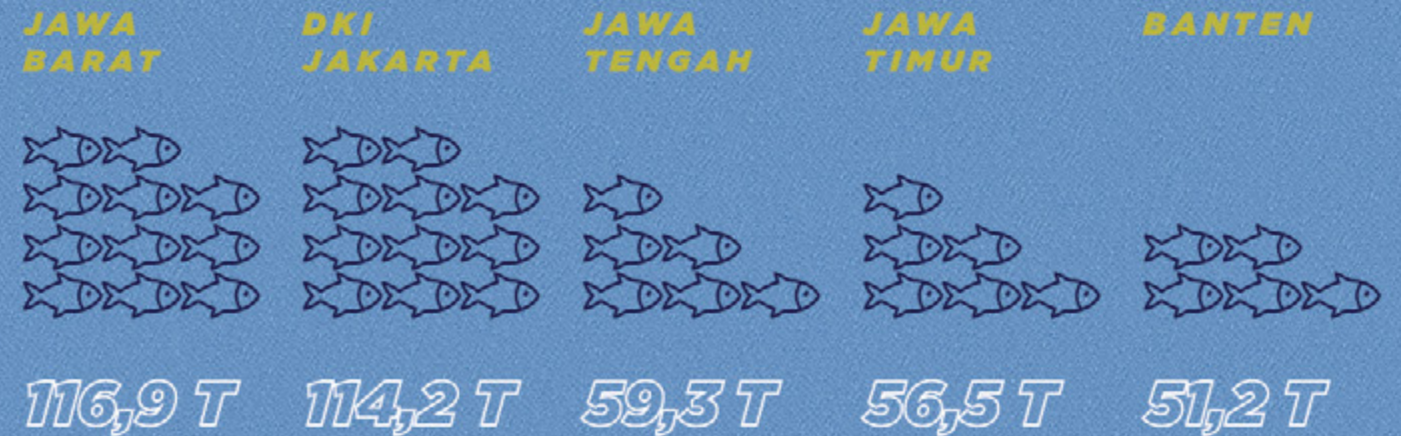
## Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)



## Realisasi Investasi berdasarkan Negara Asal (2018) \*million dollar



## Realisasi Investasi Tahun 2018 berdasarkan Lokasi



Di tahun 2019 PTDI diantaranya berhasil merampungkan pesanan satu unit pesawat CN235 untuk Nepal.

Foto  
Anas Nur Huda



# Gerak Bersama Lambungkan Indonesia

Teks Dimach Putra

**A**kselerasi investasi dan peningkatan ekspor telah lama menjadi prioritas nasional dalam menyeimbangkan neraca transaksi berjalan. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah pusat untuk mendukung upaya tersebut akan banyak bersentuhan dengan wewenang pemerintah daerah (Pemda). Perlu usaha serius dari Pemda untuk terus berlomba-lomba menambah daya tarik agar daerahnya dilirik para investor untuk membuka usaha di sana. Selain itu, kesiapan pelaku usaha harus terus didorong agar produknya memiliki daya saing sebagai komoditas ekspor.

## Belajar dari Jabar

Di tingkat nasional, Jawa Barat (Jabar) berhasil menorehkan persentase tertinggi terkait investasi. Provinsi yang dipimpin Ridwan Kamil ini mencatat

persentase sebesar 16,2 persen sebagai daerah kontributor tertinggi untuk realisasi investasi. Pemda Jabar juga berhasil mencatat persentase tertinggi realisasi investasi penanaman modal asing (PMA), sebesar 19,1 persen. Bumi Pasundan juga berkontribusi besar untuk menambah PDB nasional sebesar 24,4 persen di sektor industri manufaktur.

Di bidang ekspor, Jabar juga memimpin sebagai daerah dengan kinerja ekspor nasional. Produk komoditas yang diunggulkan Jabar antara lain dari industri mesin, mekanik, dan elektronik, serta industri tekstil. "Di Jawa Barat kami juga memiliki industri di bidang kendaraan, pesawat terbang dan perlengkapannya yang menyumbang 16,25 persen dari komposisi komoditas ekspor Jawa Barat," beber Moh. Arifin Soedjayana, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, merinci.

Sebagai industri khas yang hanya ada di Jawa Barat, bahkan satu-satunya di Asia Tenggara, PT Dirgantara Indonesia (PTDI) memiliki peran dalam menambah angka kinerja ekspor Jabar. Sepanjang 2019 lalu, PTDI berhasil merampungkan pesanan 1 unit pesawat CN235 untuk Angkatan Darat Nepal dan 2 unit pesawat NC212i untuk MOAC Thailand. Meski secara kuantitas produk yang dihasilkan tergolong kecil, namun nominal yang dihasilkan cukup menjanjikan. Sebagai contoh, nilai kontrak dari tiga pesawat tersebut kurang lebih mencapai US\$ 55 juta. Untuk memenuhi permintaan tersebut PTDI menjalin kerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI), special mission

vehicle di bawah Kemenkeu, melalui national interest account (NIA). Bantuan yang didapat berupa pembiayaan melalui skema buyer's credit dan working capital untuk negara-negara yang dibidik oleh Perusahaan dalam kaitannya untuk peningkatan ekspor.

Industri penerbangan memiliki tantangan unik yang menuntut pemain dalam industri ini terus berbenah. Dari sisi eksternal upaya peningkatan ekspor, perusahaan plat merah ini terus menyesuaikan adanya perkembangan teknologi dan pasar. Untuk itu solusinya adalah membina kerjasama strategis dengan industri penerbangan terkemuka terkemuka di dunia. Tujuannya agar dapat meningkatkan kemampuan teknologi melalui peran sebagai global supply chain. "Sehingga technology readiness level (TRL) dan manufacturing readiness level (MRL) PTDI dapat mencapai level yang diakui di seluruh dunia" ungkap Elfen Guntoro, Direktur Utama PTDI.

## Nasionalisme Sebiji Cokelat Ekspor

Satu lagi kisah sukses upaya peningkatan ekspor secara holistik yang melibatkan kerjasama banyak pihak datang dari Bali. Desa Nusasari di Kabupaten Jembrana baru saja ditetapkan sebagai Desa Kakao Devisa, sebuah pilot project yang diinisiasi oleh LPEI. Perjalanan panjang desa ini hingga sukses menjadi percontohan pengolahan kakao dimulai tahun 2010.

Keberhasilan desa ini tak lepas dari hadirnya pendampingan dari Yayasan Kalimajari. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut berfokus pada

pemberdayaan masyarakat melalui dua komoditas spesifik yaitu kakao dan rumput laut. Tujuan mereka adalah meningkatkan potensi produk kakao di Desa Nusasari. "Saat itu Pemda Jembrana mengizinkan kami dengan cara menghidupkan kembali Koperasi Kerta Samaya Samaniya (KSS), yang saat itu sudah terbengkalai," ungkap IGA Agung Widiastuti, Direktur Yayasan Kalimajari.

Pendekatan mereka awalnya sempat ditolak komunitas petani lokal yang sudah tidak percaya dengan Koperasi KSS yang mereka aktifkan kembali. Tapi widi dan timnya tak menyerah dalam memperkenalkan perubahan yang akan mereka buat. Beberapa poin penting yang mereka perkenalkan kepada petani lokal adalah mengubah komoditas kakao menjadi organik, berkesinambungan dan menambah value produk yang dijual menjadi fermented beans. Dengan langkah tersebut, akan meningkatkan harga jual produk. Keunggulan lain dari biji kakao fermentasi adalah pencantuman asal (origin) dari produk tersebut ketika dijual dan diolah di seluruh dunia.

Perkenalan KSS dan Kalimajari dengan LPEI dimulai di 2012. Bantuan yang diberikan LPEI adalah penyediaan pelatihan dan penyediaan sarana-prasarana koperasi, yang berfokus untuk peningkatan kapasitas koperasi dan para anggotanya. Tonggak sejarah produk biji kakao hasil dari petani di Nusasari dikenal internasional terjadi pada 2014. Saat itu KSS bersiap melakukan rencana ekspor pertama mereka di tahun berikutnya. Sebagai tindak lanjut serius, KSS meminta bantuan berupa training penguatan ekspor dari LPEI.

Pendampingan Yayasan Kalimajari kepada para petani yang tergabung di Koperasi KSS memang menitikberatkan pada kesinambungan. Oleh karena itu, proposal bantuan yang mereka ajukan ke LPEI lebih banyak berbentuk permohonan penyediaan pelatihan. Bagi anggota, ilmu yang diperoleh dari pelatihan akan dijadikan bekal untuk pengembangan kualitas produk biji kakao fermentasi Jembrana. Sementara itu, untuk pengelola koperasi dan yayasan pelatihan tersebut berperan dalam peningkatan kompetensi pendampingan tak hanya ke anggota, tapi juga ke pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan. Upaya bersama ini terus dilakukan untuk menjamin kelestarian biji kakao fermentasi agar tetap menjadi komoditas utama di Jembrana. "Dan tentunya, memastikan merah putih tetap dikenal, meski dari sebiji coklat dari Jembrana." pungkasnya.

# Menyemai Tekad Berkompetisi

Teks CS. Purwowidhu

Astera Primanto  
Bhakti, Direktur  
Jenderal  
Perimbangan  
Keuangan

Foto  
Resha Aditya P.

**D**i tengah kondisi perekonomian global yang diproyeksikan semakin melemah, pemerintah bergegas mengambil langkah antisipasi agar defisit neraca dagang tak semakin melebar. Pemberian stimulan menjadi salah satu opsi agar daerah termotivasi membenahi iklim investasi. Peningkatan investasi dan ekspor dijadikan filtrasi baru dalam kebijakan pemberian insentif daerah di 2020. Simak wawancara Media Keuangan dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bhakti, seputar peran Dana Insentif Daerah (DID) sebagai pendorong pertumbuhan investasi dan ekspor.

## Mengapa peningkatan investasi dan peningkatan ekspor menempati dua prioritas teratas untuk pengalokasian DID 2020?

DID ini kan salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk mendorong kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) berdasarkan suatu kriteria tertentu yang sejalan dengan prioritas nasional. Pada saat kita lihat kondisi di 2019, ada beberapa hal yang memang harus didorong lebih cepat, antara lain investasi, ekspor, dan pengelolaan sampah. Investasi dan ekspor adalah 2 tools yang sangat substansial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, jadi dimasukkan sebagai top list dalam pembuatan DID. Di 2020 memang investasi dan ekspor ini betul-betul diharapkan bisa menjadi pengungkit perekonomian nasional. Ekonomi nasional itu agregat dari ekonomi daerah. Tentunya harapan kita dengan pemberian insentif ini, daerah-daerah akan berlomba-lomba untuk memperbaiki kinerjanya di bidang-bidang tertentu.

## Seperti apa kriteria dan batasannya?

Sebenarnya sama seperti DID secara umum. Pertama yang kita lihat adalah kriteria utama, mencakup: (1) opini BPK atas laporan keuangan Pemda Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); (2) penetapan Perda APBD tepat waktu; (3) pelaksanaan e-government; dan/atau (4) ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kalau kriteria utama itu sudah terpenuhi, baru kita lihat poin-poin yang bisa mendapat insentif atau disebut kriteria kinerja. Kategori kinerja meliputi pelayanan publik, mulai dari pendidikan dan lain-lain, sampai kinerja investasi, ekspor, dan pengelolaan sampah.

## Bagaimana penilaian kinerja investasi dan ekspor daerah?

Kinerja dilihat melalui data-data yang diambil dari institusi yang berwenang.

Untuk penilaian kinerja investasi, kita pakai indikator nilai investasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Sedangkan kinerja ekspor diukur melalui nilai ekspor terhadap barang komoditas ekspor yang keluar dari daerah pabean lewat pelabuhan dan/ atau bandara. Lalu kita hitung selisih nilai kinerja selama 2 tahun. Setelah semua data daerah terkumpul, kita akan lihat dia ada di di posisi berapa. Tiap kriteria punya nilai sendiri. Ini yang membedakan dari tahun-tahun sebelumnya, misal kategori ekspor, kalau memang dia hebat di ekspor, dalam arti lolos di atas threshold setelah disandingkan dengan daerah-daerah lainnya, dia akan mendapat insentif. Kita harus benar-benar melihat mana yang memberikan dampak yang signifikan untuk daerahnya dan itu kita lihat secara nasional.

## Berapa daerah penerima DID kategori kinerja investasi dan ekspor di 2020?

Alokasi DID 2020 kategori peningkatan investasi diberikan kepada 5 provinsi, 19 kota, dan 80 kabupaten, dengan total alokasi sebesar Rp1,3 triliun. Lima provinsi itu adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Banten. Sementara untuk peningkatan ekspor diberikan kepada empat provinsi, 61 kota, dan 19 kabupaten, dengan total alokasi sebesar Rp1,1 triliun. Empat provinsi itu adalah Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, dan Banten. Alokasi tertinggi di tiap kategori tersebut sebesar Rp14,68 miliar dan rata-rata alokasi sebesar Rp13,34 miliar.

## Bagaimana dengan kekhawatiran akan ada gap antara daerah yang menerima insentif dan yang tidak?

Elemen dari TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) ini kan ada yang sifatnya block grant dan ada yang specific grant. Untuk block grant, kita

contohnya ada Dana Alokasi Umum (DAU) yang memang tidak melihat maju atau mundurnya suatu daerah tetapi betul-betul melihat kebutuhan daerah tersebut. Nah, itu bisa diatasi dari situ. Jadi, kalau menurut saya yang umum itu tetap ada, tapi yang khusus (DID) karena ini kan hadiah nih, jadi ya harus lebih selektif. Pelan-pelan kita juga akan coba refocusing ke beberapa kriteria yang betul-betul punya daya ungkit tinggi untuk pembangunan supaya daerah yang dapat itu bisa terbangga.

## Kendala apa yang dihadapi dalam penyaluran DID?

Masalahnya kalau ada yang tidak comply. Dulu, sebelum tahun 2018 itu, pokoknya jumlahnya berapa langsung transfer salur. Mulai 2018, mekanisme penyaluran berubah menjadi berbasis kinerja. Daerah penerima harus menyampaikan Perda APBD dan rencana penggunaan DID tahun berjalan, juga laporan realisasi penyerapan DID tahun anggaran sebelumnya. Jadi, walaupun pemda sudah bagus, tetapi kalau tidak bisa memenuhi syarat penyaluran, ya tentunya dia juga akan punya masalah, bisa nggak disalurkan juga dananya.

## Apa yang diharapkan dari pemda dengan adanya DID ini?

Jadi, harapan kami daerah akan berkompetisi untuk hal yang positif dan level kompetisinya akan meningkat terus. Dengan begitu, daya saing daerah paling tidak akan meningkat sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Ease of doing business dan segala macam indeks yang ada kaitannya dengan investasi juga pasti akan lebih baik. Ini sebenarnya merupakan grass root dari pencapaian nasional.

# Kelola Sawit Jadi Duit



Indonesia merupakan salah satu penghasil minyak sawit (CPO) terbesar di dunia. CPO menjadi salah satu kontributor utama terhadap kinerja ekspor. Salah satu kota penghasil dan eksportir terbesar di Indonesia adalah Dumai yang terletak di Provinsi Riau. Proses pengolahan sawit dimulai dari perkebunan, pengolahan, hingga penyulingan menjadi CPO dilakukan di Kota Dumai.

Foto  
Edy Singomoto

Teks  
Resha Aditya P.

# Teka-Teki \* Medkeu

## Mendatar

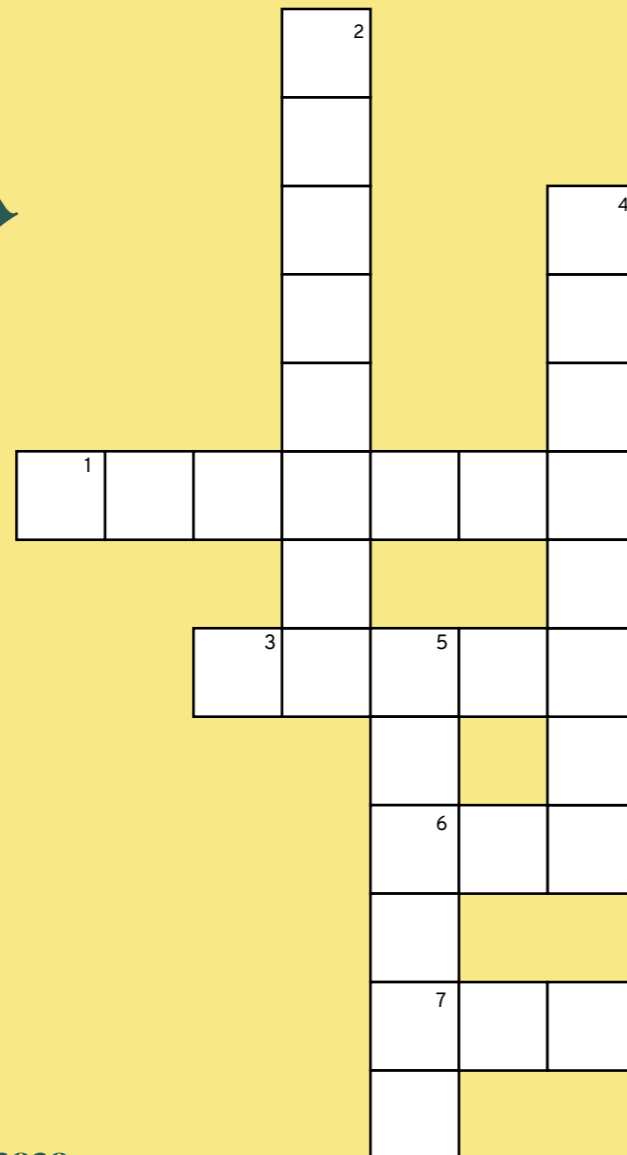
1. CAD merupakan singkatan dari Current Account....
3. Bulan batas akhir pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.
6. Salah satu produk surat berharga negara.
7. Keputusan Menteri Keuangan.

## Menurun

2. Tagar utama Kementerian Keuangan.
4. Padanan kata *Drive Thru* dalam Bahasa Indonesia.
5. Huruf R dalam nama unit DJPPR.

Kirim jawaban Anda melalui *story post* instagram dengan *tag* IG @majalahmediakeuangan atau melalui email [mediakeuangan@kemenkeu.go.id](mailto:mediakeuangan@kemenkeu.go.id), sertakan nama dan nomor telepon yang dapat dihubungi

**Jawaban kami tunggu sampai tanggal 10 April 2020.**



## \* Selamat kepada:

1. Kunto Ariwibowo
2. Rizki Z. Arifandi
3. Dahlia

sebagai pemenang Teka-Teki Medkeu edisi Februari 2020. Tunggu hadiah dari kami, ya!



Aryanti R. Yacub, co-founder Ikatan Sindroma Down Indonesia (ISDI)

Foto Anas Nur Huda

**M**endungnya langit tak memadamkan semangat karateka Dojo 37 ISDI (Ikatan Sindroma Down Indonesia) berlatih pagi itu. Sekitar dua puluh insan istimewa pemilik 47 kromosom bergerak padu mengikuti arahan dua sensei bersabuk hitam. Dengan latihan rutin bertahun-tahun, belasan gerakan mampu dihafal. Sesuatu yang tak disangka, bahkan oleh orang tua mereka. Nyatanya, mereka

mampu menerobos keterbatasan yang selama ini dianggap menjadi hambatan.

Karate adalah satu dari beragam aktivitas yang dirancang ISDI bagi para penyandang sindrom down untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas hidupnya. Menyambut Hari Sindrom Down pada 21 Maret, Media Keuangan bertemu dengan salah satu pendiri ISDI, Aryanti R. Yacub. Melalui peningkatan *life skills* dan keterampilan, wanita setengah baya itu berharap

penyandang sindrom down di Indonesia mempunyai masa depan lebih cerah dan tak lagi mendapat stigma negatif dari masyarakat. Berikut petikan perbincangannya.

### Bagaimana cerita awal mula berdirinya ISDI?

Awal berdirinya ISDI itu 21 April 1999. Ada sepuluh orang tua, termasuk saya, yang mempunyai anak sindrom down bersekolah di SLB C Dian



Aktivitas di Center of Hope ISDI

Foto Anas Nur Huda

Grahita Kemayoran. Kepala Sekolahnya meminta saya untuk membantu mereka membentuk suatu wadah yang menginformasikan hal terkait sindrom down. Apa itu sindrom down, mengapa terjadi, bagaimana merawatnya, dan sebagainya.

Saya membutuhkan waktu satu tahun untuk mendirikan karena saat itu istilahnya saya masih buta huruf. Saya sendiri tidak mengerti apa itu sindrom down. Yang saya satu hanya ada pelecehan dari masyarakat, dilihat sebelah mata, bahkan dijauhi. Itu membuat kami sedih, ketakutan, dan malu. Berbagai masalah kejiwaan timbul di dalam diri kami, termasuk banyak yang disingkirkan keluarganya karena stigma negatif.

Setelah membentuk ISDI, setiap bulan kami mengadakan kumpul keluarga dan mendengar ceramah dari narasumber yang diundang. Itu

mengubah pandangan hidup kami secara signifikan. Pelan-pelan, kami mulai merasa aman, tidak sendirian, dan satu perjuangan. Kami merasa, oh betul jika kita sama-sama membentuk sesuatu yang positif, hidup kita juga positif. Itulah misi dan visi kami.

Nah, kemudian kami membentuk Center of Hope ISDI. Itu tahun 2009. Kenapa? Anak-anak kami kan sudah hampir 10 tahun bersekolah. Sudah bertambah umur 10 tahun, tetapi kami melihat kok mereka tidak bisa apa-apa. Ternyata mereka tidak cocok dengan kurikulum sekolah. Arahnya bukan ke sana. Mereka seharusnya dilatih kemandirian. *Life skills*. Kami lalu berpikir lebih baik bikin kelas sendiri.

#### Apa saja isi kurikulum Center of Hope ISDI?

Ada membaca dan menulis, yang tentunya disesuaikan dengan

kemampuan masing-masing anak. Mereka diajari menulis nama dan nomor telepon. Kalau terjadi sesuatu, minimal dia bisa menulis nama dan nomor teleponnya. Bisa bertahun-tahun belajar hingga dia hafal. Ada olahraga dan kesenian. Selebihnya adalah keterampilan kemandirian. Masak, cuci baju, setrika. Lebih kepada, jika sendirian, bagaimana dia harus hidup.

Belajar masak misalnya, mulai dari belanja, mengenal bahan, hingga memasaknya. Misalnya sup, ada apa saja di dalam sup? Kita ambil yang sederhana: wortel, kentang, buncis. Sudah tiga itu saja. Belajar nilai uang, belajar belanja di supermarket, belajar jenis bahan sayurnya, itu semua menjadi serangkaian pembelajaran. Prosesnya panjang. Untuk bikin sup perlu belajar beberapa bulan atau setahun sebelumnya.

Kami bersikeras mereka harus



Para penyandang sindrom down berlatih karate di GOR Sunter

Foto A. Wirananda

lebih mandiri. Apapun keterbatasannya, mereka bisa dilatih. Dan itu lama sekali. Kan individual berbeda-beda ya, punya waktunya masing-masing. Misalnya Si A paling tidak bisa mandi sendiri, itu yang kami ajari. Di rumah PR-nya ya itu, sampai dia bisa. Dan itu dinilai dari 1 sampai 10. Orang tua harus jujur memberi nilai. PR itu bisa bertahan bertahun-tahun sampai dia benar-benar bisa. Moto saya, beban jadi berkah. Tetapi perlu kerja keras, ya kan?

#### Ada kegiatan karate juga ya, Bu?

Kami membentuk Dojo 37 ISDI. Saya mengenal salah satu pembina karate dan menanyakan tentang pembentukan grup latihan karate. Dia sangat antusias sekali. Dojo sindrom down ini pertama di Indonesia dan mungkin di dunia. Betul-betul dibentuk secara grup. Jadi kami sangat bangga.

#### Berapa banyak penyandang sindrom down di Center of Hope?

Ada tiga puluh, itu pun tidak

semuanya setiap hari datang. Ada yang orang tuanya sudah tua jadi tidak bisa mengantarkan. Di sini kami tidak membatasi usia dan tidak ada lulus-lulusan. Berlatih saja terus. Namun dari segi jumlah guru dan pendamping, kami bisa menampung sekitar 30 anak. Kalau terlalu banyak, kami tidak bisa menangani juga.

#### Bagaimana Ibu melihat dukungan dan penerimaan dari masyarakat

Dukungan saat ini sudah jauh lebih bagus. Malah kami terharu karena antusias masyarakat. Ketika anak-anak tampil, tepuk tangannya seru. Kami merasa bahwa kami sudah terangkat. Dulu, kami sering menangis karena mau membawa anak-anak saja, orang langsung menyingkir. Sekarang sangat jauh lebih bagus, tetapi belum semuanya ya. Oleh karena itu, saya suka diajak wawancara untuk membantu mensosialisasikan tentang sindrom down.

Dari segi spiritual, mereka adalah

manusia ciptaan Tuhan. Jadi, janganlah berprasangka buruk pada mereka. Kalau bertemu di jalan ya sapa saja. Walaupun tidak kenal, mereka jika disapa akan menyahut. Anak-anak ini tidak memiliki *negative feeling* sama sekali.

#### Bagaimana dengan orang tua yang belum bisa memfasilitasi anaknya berlatih kemandirian di tempat khusus seperti ini? Ada pesan?

Saya selalu bilang begini karena saya juga mengalaminya. Jadi, saya tidak banyak memberikan terapi ini dan itu kecuali dia sakit. Sakit itu lain hal. Kalau dia tidak sakit, dia sehat, banyak lakukan terapi di rumah saja. Misalnya ajak menyapu bersama, menyiram tanaman bersama. Pekerjaan sehari-hari di rumah itu juga adalah terapi. Jadi, bukan kita harus ke satu tempat terus kita belajar. Tidak seperti itu. Sehari-hari di rumah juga terapi. Perlu ada dukungan keluarga, interaksi dengan keluarga, dan *bonding*.



Gedung  
KPPBC TMP  
C Madura

Foto  
Resha Aditya

KPPBC TIPE MADYA PABEAN C MADURA

## Menuai Berkah Hijrah

Teks A. Wirananda

*Dua tahun silam, kantor di timur laut Jawa ini hijrah. Konon, hijrah tak semata ihwal berpindah lokasi. Lebih dari itu, hijrah adalah perkara transformasi. Demikian pula yang terjadi pada kantor yang dikomandoi Yanuar Calliandra ini. Kantor yang semula bermarkas di Sumenep ini berpindah ke Pamekasan pada 2019. Kala itu, kantor ini masih di bawah komando Latif Helmi. Tak semata berpindah secara fisik, perpindahan kantor ini sekaligus menjadi momentum bertransformasi, momentum naik kelas.*

“Dua tahun yang lalu, kantor ini berubah. Dari kantor pelayanan pratama, sekarang sudah menjadi madya,” ujar Yanuar berkisah.

Transformasi kantor ini sejatinya juga menggambarkan adanya peningkatan, baik dari besar cakupan layanan, ragam pengguna layanan, pun target penerimaan negara yang mesti dipenuhi.

Semula, tak banyak sorotan mampir ke kantor ini. Perkenalkan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) C Madura. Dalam dua tahun belakangan, KPPBC TMP C Madura berhasil menorehkan catatan manis ihwal penerimaan cukai. Tak semata

ihwal penerimaan, KPPBC TMP C Madura juga berhasil membawa pulang penghargaan Zona Integritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) akhir tahun silam.

### **Gempur Rokok Ilegal**

Madura, sebagai bagian dari jajaran penghasil tembakau kelas wahid, tentu menjadi tanah yang ramah bagi industri tembakau. Dalam rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur tahun 2018, Pamekasan dan Sumenep menduduki tiga besar penghasil tembakau di Jawa Timur. Di saat yang bersamaan, Madura sekaligus



Kunjungan ke salah satu pelaku industri rokok

Foto Resha Aditya

menghasilkan varietas tembakau unggulan paling beragam di antara berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur. Tembakau unggulan besutan Madura antara lain adalah Cangkring dan Prancak.

Di sisi lain, sayangnya produksi yang tinggi ini berbanding lurus dengan peredaran rokok ilegal di wilayah setempat. Menurut perhitungan KPPBC TMP C Madura, penindakan rokok ilegal sepanjang tahun lalu mencapai 6,8 juta batang rokok. Dari jumlah sebesar itu, taksiran kerugian negara mencapai 2,5 miliar rupiah. Angka ini meningkat dari jumlah penindakan yang dilakukan di tahun sebelumnya. Pada 2018, penindakan rokok ilegal yang dilakukan KPPBC TMP C Madura mencapai 5,4 juta batang rokok. Rokok ilegal itu beredar di empat kabupaten di wilayah Madura, dengan peredaran paling tinggi di wilayah Pamekasan dan Sumenep. Rata-rata rokok ilegal yang beredar merupakan besutan lokal Madura, kendati sebagian kecil di antara jumlah itu diproduksi di luar wilayah Madura.

Banyak faktor yang mempengaruhi lahirnya sekian banyak rokok ilegal di wilayah tersebut. Yanuar mengatakan, “rata-rata masyarakat membeli rokok

ilegal karena harganya murah.” Harga yang murah tentu saja menjadi menarik bagi sebagian konsumen rokok.

#### Optimisme Penerimaan

Peredaran rokok ilegal masih tetap ada. Namun, di saat yang sama, optimisme punggawa KPPBC TMP C Madura pantang surut juga. Optimisme ini tentu bukan harapan kosong belaka. Terbukti pada 2019, KPPBC TMP C Madura mampu membukukan capaian kinerja yang jempolan. Dari target yang ditetapkan sebesar 273 miliar rupiah, KPPBC TMP C Madura berhasil mencatatkan 290 miliar rupiah, atau setara dengan 106 persen dari target yang ditetapkan.

Pada periode ini, capaian superior di sisi penerimaan, diiringi pula capaian pada sisi layanan. Pada 10 Desember 2019, kantor ini mengantongi predikat Wilayah Bebas dari Korupsi. Penghargaan integritas ini diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo. Tak hanya itu, KPPBC TMP C Madura juga membukukan catatan manis lainnya ihwal pelayanan. Dalam Survei Kepuasan Pengguna Jasa 2019, mereka diganjar angka 4,70 dari skala 5. Angka yang terbilang tinggi dalam

kategori layanan pabean dan cukai.

Raihan gemilang ini tentu akan terus menjadi cambuk perbaikan bagi KPPBC TMP C Madura. Pada 2020 ini, target penerimaan cukai ditingkatkan menjadi 297 miliar rupiah. Sedangkan, target peredaran rokok ilegal di wilayah Madura tahun 2020 diharapkan turun menjadi tiga persen. Pada periode sebelumnya, peredaran rokok ilegal mencapai angka tujuh persen. Target ini bukan perkara yang mudah mengingat pada 2020, pemerintah telah menetapkan kenaikan tarif cukai. Namun, Yanuar tetap optimis mampu mencapai target yang ditetapkan dengan berbagai strategi yang telah dipersiapkan. “Kami konsisten memitigasi risiko ini dengan memperbanyak intensitas sosialisasi dan edukasi,” katanya. Edukasi adalah bagian penting ihwal penerimaan cukai. Sebab, dana yang diperoleh dari penerimaan cukai, nantinya akan disalurkan kembali kepada pemerintah daerah melalui mekanisme dana bagi hasil. Dengan kata lain, cukai yang disetorkan pengusaha di daerah, akan kembali lagi menjadi keuntungan bagi daerah itu sendiri.

# Langkah Mengajukan Permohonan Informasi via E-PPID.



Bila kamu pemohon perorangan, jangan lupa siapkan scan KTP.

Untuk pemohon badan hukum, siapkan bukti pengesahan sebagai Badan Hukum.

Pemohon kelompok orang, siapkan surat kuasa serta KTP pemberi dan penerima kuasa.



Untuk permohonan baru, lakukan registrasi terlebih dahulu. Kunjungi situs web [e-ppid.kemenkeu.go.id](http://e-ppid.kemenkeu.go.id), lalu pilih menu login atau klik ikon Layanan Informasi.

Pilih register. Lengkapi datamu. Klik daftar. Tunggu akunmu aktif. Pemberitahuan aktivasi akun dikirimkan ke email yang kamu daftarkan.



Login. Lengkapi data permohonan informasimu.

Setelah mendapatkan email aktivasi akun, login menggunakan email dan password yang telah didaftarkan.

Lengkapi kolom isian. Jangan lupa lampirkan file identitas dan dokumen pendukung apabila ada. Klik Simpan.



Permohonan Informasi Publik akan ditanggapi dalam waktu **10+7 hari kerja**.

Sesuai ketentuan dalam UU Keterbukaan Informasi Publik, tanggapan atas Permohonan Informasi Publik paling lambat disampaikan 10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja berikutnya dengan menyertakan alasan tertulis.



# Amanah Sepanjang Hayat Sang Penakar Manfaat

Teks Dimach Putra | Foto Dok. DJKN



**Budi Purnomo**

Kepala Seksi Standardisasi Penilaian Bisnis

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan aset berupa barang milik negara (BMN) yang tersebar di tujuh belas ribu lebih pulaunya. Dengan potensi kekayaan yang dimiliki, mata rantai siklus pengelolaan aset negara tak lepas dari peran penilaian. Proses penatausahaan, pemanfaatan, pemindahtanganan hingga penghapusan membutuhkan informasi yang merupakan jerih payah keringat para penilai kekayaan negara.

## Syarat Berat Penakar Manfaat

Profesi sebagai penilai salah satunya dijalani oleh Budi Purnomo. Pria kelahiran Bojonegoro ini telah melakoni peran tersebut selama 14 tahun. Karier sebagai penilai Ia mulai pada tahun 2006, enam tahun setelah pertama kali mengabdikan diri di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan. Asam garam telah ia rasakan hingga mengantarnya menjadi Kepala Seksi Standardisasi Penilaian Bisnis pada Subdirektorat Standardisasi Penilaian Bisnis dan Sumber Daya Alam (SPBSDA), Direktorat Penilaian.

Bapak dua anak ini sangat memahami beratnya kualifikasi menjadi seorang penilai kekayaan negara. Kriteria yang disyaratkan sangat panjang dengan kemampuan khusus yang harus dimiliki. Setidaknya ada empat keahlian khusus yang harus dikuasai seorang penilai. Pemahaman tentang penilaian properti harus menjadi dasar kemampuan yang harus dimiliki penilai yang ada dalam timnya. Syarat berikutnya adalah keahlian dalam manajemen keuangan dan akuntansi sebagai bekal membuat proyeksi laba dan rugi. Keahlian terakhir adalah pemahaman akan perilaku bisnis

berdasar kekhasan tiap jenis aset yang dinilai.

"Contohnya nih, penilaian Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya yang sekarang dikelola Angkasa Pura," ujar Budi menceritakan salah satu pengalamannya. Berkat penilaian yang Ia lakukan dengan tim, capital expenditure (Capex) bandara tersebut yang dulunya berasal dari APBN, kini dikeluarkan oleh Angkasa Pura sebagai pengelola. Tak hanya pengalihan Capex, bandara tersebut kini berkontribusi tetap sebesar sembilan miliar untuk negara.

Tak hanya bandara, Pria yang telah mengabdikan selama dua puluh tahun ini pernah terlibat penilaian aset besar lainnya. Kilang minyak, lapangan golf, mall, hingga hotel pernah Ia nilai. Kesemua aset tersebut kini memberikan kontribusi tetap bagi negara. Berkat peran para penilai sepertinya, aset negara bisa dioptimalkan manfaatnya. Tak hanya idle dan terlantar sia-sia. Namun, semua hal tersebut menuntut penilai untuk cermat dan luwes dalam melakukan pekerjaannya. Cermat agar pemanfaatannya bisa tepat guna, luwes supaya bisa menilai aset dengan karakteristik khasnya masing-masing.

## Tanggung Jawab Tetap Melekat

Tugas seorang penilai memang berat. Tak jarang Ia dan teman-temannya mendapat resistensi warga sekitar. Bukan sekali dua kali Ia dihadang warga yang menghunus parang saat akan menilai. Contohnya saat akan menilai Bandara Sentani, Jayapura. Aset yang dahulu dikelola oleh Dinas Perhubungan tersebut dinilai untuk proses pemindahtanganan pengelolaan ke Angkasa Pura, sama seperti kasus di Bandara Tjilik Riwut. Penolakan

tersebut dapat Ia maklumi. Wajar muncul kekhawatiran orang-orang yang menggantungkan hidupnya di sana dengan datangnya pengelola baru. "Yang berat bukan hanya itu," ucapnya lirih, sambil menghela nafas Ia melanjutkan, "tapi juga tanggung jawab yang harus kami pikul selama kerjasama pemanfaatan berlangsung."

Tanggung jawab kerja sama pemanfaatan aset negara melekat hingga usia pensiun para penilai karena periode pemanfaatan bisa berlangsung 30 hingga 50 tahun. Bukan tidak mungkin 10 tahun mendatang nilai manfaatnya dianggap terlalu kecil. Jika sudah seperti itu, tim penilai yang dahulu terlibat memetakan potensi aset tersebut akan dipanggil dan dimintai pertanggungjawabannya. Risiko itu akan membayang-bayangi para penilai.

Pekerjaan penilai adalah memetakan potensi dan memberikan opini. Ada tiga opsi pemanfaatan dengan kadarnya masing-masing, pesimis, moderat, dan optimis. Seiring berjalannya waktu kerja sama pemanfaatan, bisa jadi pemohon atau pengelola menjalankan pilihan yang mana. Para penilai tidak mengetahui persis bagaimana kemudian opsi tersebut dieksekusi oleh pengelolanya. "Bisa aja 30 tahun lagi kok begini, kecil, padahal usia saya sudah 72 tahun, laporan penilai lainnya mungkin juga sudah hilang kan?" ucapnya berandai-andai.

## Pinta Penilai Negara

Masa depan memang masih menjadi misteri. Pun bagi Budi sebagai penilai, meski kini Ia sudah menempati posisi yang cukup nyaman sebagai Kepala Seksi. Sebelum menduduki jabatannya kini, Ia sendiri sudah merasa nyaman menjadi seorang penilai. Baginya



Budi Purnomo, Kepala Seksi Standardisasi Penilaian Bisnis

Dokumentasi penilaian aset negara

Foto Anas Nur Huda Dok. DJKN

tantangan dari beragam jenis pekerjaan justru membuatnya tidak bosan dengan profesi yang Ia geluti.

"Terus terang saya sangat menikmati, mungkin karena tiap case itu selalu ada hal menarik yang baru dan menuntut saya untuk terus belajar," beber suami dari seorang istri yang juga merupakan PNS di Bojonegoro ini. Ketidaktahuannya akan suatu kasus baru yang ia temui membawa langkahnya ke toko buku untuk mencari referensi yang sesuai. Bertemu dan berbincang dengan narasumber yang mumpuni pun menjadi ajang baginya untuk selalu menimba ilmu. Jika sedang tak pulang ke Bojonegoro, yang biasa Ia lakukan dua minggu sekali, akhir pekan sering Ia habiskan di kantor untuk lembur dan mempelajari case yang Ia hadapi.

Semua itu ikhlas Budi lakukan, dengan diselipkan sepercik asa. Ia berharap agar penilai plat merah ini tidak kalah bersaing dengan konsultan profesional. Untuk itu, Ia terus memotivasi diri dan rekan setimnya untuk terus memantaskan diri. Agar hal tersebut tercapai, mereka juga berharap agar segera ada pihak yang menjembatani agar para penilai ini mendapat sertifikasi yang sesuai, *chartered financial analyst* (CFA) misalnya. Reformasi birokrasi aparaturnya sipil negara (ASN) yang terus didorong oleh Presiden Joko Widodo juga memberi sedikit angin segar bagi profesi penilai. "Ya harapannya itu segera berjalan, agar profesional dan bisa fokus di situ. Jadi nanti bisa diakui atau bersertifikasi saat sudah menjadi jabatan fungsional," serunya menutup sesi wawancara dengan kami.



# Leptospirosis, Penyakit Mematikan Saat Banjir Datang

Sejak awal tahun 2020, Indonesia memasuki musim hujan dengan intensitas cukup tinggi di beberapa daerah yang mengakibatkan banjir. Kondisi ini tentu saja berdampak negatif terhadap kesehatan. Beberapa penyakit akan muncul saat musim hujan dan banjir tiba. Salah satu yang perlu diwaspadai adalah penyakit Leptospirosis.

Penyakit yang bisa berujung kematian ini kasusnya meningkat terutama pada kondisi banjir. Berdasarkan data Center Disease of Control and Prevention (CDC) tahun 2013, Leptospirosis memiliki insiden tertinggi pada daerah tropis, terutama setelah hujan deras dan banjir.

Kementerian Kesehatan mencatat 435 kasus, dengan 62 kematian akibat Leptospirosis yang terjadi hingga November 2014. Sementara itu, di tahun 2018 ditemukan kasus Leptospirosis sebanyak 31 kasus dengan 2 kasus diantaranya meninggal dunia.

## Leptospirosis Bukan Penyakit Biasa

Penyakit Leptospirosis disebabkan

oleh bakteri *Leptospira interrogans* yang hidup di dalam ginjal tikus. Masyarakat yang berada di lokasi banjir berisiko tinggi terinfeksi Leptospirosis sebab air banjir berpotensi terkontaminasi urine tikus yang mengandung bakteri tersebut. Luka goresan pada kulit, konsumsi air, atau makanan yang terkontaminasi air banjir, menjadi jalan masuk bakteri tersebut ke dalam tubuh manusia.

Lalu bagaimana tanda-tanda seseorang terinfeksi penyakit Leptospirosis? Gejala awal penyakit Leptospirosis muncul pada hari ke-7 hingga ke-12 setelah terinfeksi bakteri *Leptospira*. Demam tinggi mendadak, tubuh menggigil, sakit kepala, nyeri otot, ruam kulit, mual, muntah, serta tubuh terasa lemas merupakan gejala-gejala penyakit tersebut.

Banyak orang yang akan salah mengira bahwa gejala-gejala tersebut adalah flu biasa. Namun ada beberapa ciri khas dari penyakit ini yaitu pada hari ke-3 sampai ke-4 mata akan berwarna kemerahan atau dikenal dengan *conjunctival suffusion*.

Pada kasus yang berat, kulit

dan selaput mata akan berwarna kekuningan dan timbul ruam atau bercak perdarahan pada kulit. Jika tidak tertangani, penyakit tersebut akan menyebabkan gagal ginjal akut, gangguan hati, perdarahan paru, gangguan kardiovaskuler, dan perdarahan saluran pencernaan yang berakibat pada kematian.

Cegah sebelum terjangkit!

Setelah mengenali gejalanya, hal lain yang perlu kita perhatikan adalah cara mencegah infeksi bakteri *Leptospira* dengan cara: tidak merendam kaki atau badan ke dalam air banjir, gunakan alat pelindung seperti sarung tangan dan sepatu bot jika bertugas melakukan penyelamatan di area banjir, cegah luka terkena air banjir, dan gunakan masker saat membersihkan air banjir. Selain itu, cuci tangan sebelum makan dan minum, minum air bersih dan matang juga harus selalu dilakukan saat terkena musibah banjir. Terakhir, jangan biarkan anak-anak bermain atau berenang di area banjir.

# Dana BOS Disalurkan Langsung ke Sekolah

Teks Irfan Sofi  
 Analis Keuangan Pusat dan Daerah, DJPK

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyalurkan DAK Non Fisik untuk Biaya Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2020 tahap pertama sebesar Rp9,8 triliun langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Sekolah. BOS tahap pertama ini disalurkan langsung ke 136.579 sekolah yang berhak tanpa melalui RKUD Pemerintah Provinsi. Skema penyaluran langsung ini bertujuan memangkas birokrasi dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07/2020.

Penyaluran langsung ini hanya untuk BOS Reguler dan dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap pertama sebesar 30% dari pagu alokasi disalurkan paling cepat bulan Januari. Penyaluran tahap kedua sebesar 40 persen dilakukan paling cepat bulan April dan tahap ketiga sebesar 30 persen dilakukan paling cepat bulan September. Sementara itu, untuk BOS Afirmasi dan Bos Kinerja disalurkan sekaligus paling cepat bulan April dari RKUN ke RKUD.

Perubahan skema baru ini juga mendukung program merdeka

belajar yang memberikan fleksibilitas dan otonomi lebih besar bagi para kepala sekolah sehingga dana BOS dapat digunakan sesuai kebutuhan sekolah termasuk biaya operasional. Namun demikian, sekolah harus tetap memperhatikan ketentuan pengelolaan dana BOS Reguler di sekolah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

## Alokasi Dana BOS

Alokasi DAK Non Fisik BOS dalam APBN tahun 2020 naik sebesar 63,5 persen menjadi Rp54,32 triliun. Peningkatan ini disebabkan oleh perubahan besaran unit cost. Perubahan besaran unit cost untuk SD/MI dari sebelumnya Rp800.000 menjadi Rp900.000 per siswa, untuk SMP/MTS dari sebelumnya Rp1 juta menjadi Rp1,1 juta per siswa, untuk SMA dari 1,4 juta menjadi Rp1,5 juta per siswa dan untuk SMK dari Rp1,4 juta menjadi Rp1,6 juta per siswa. Sementara itu, untuk Pendidikan Khusus tetap sama yaitu sebesar Rp2 juta per siswa.

Dana BOS Afirmasi dan dana

BOS Kinerja diberikan kepada daerah sejak tahun 2019. Dana BOS Afirmasi dialokasikan untuk mendukung operasional rutin bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal. Tujuannya untuk mengejar ketertinggalan kualitas dan kualitas layanan publik. Sementara itu, dana BOS Kinerja diberikan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan layanan pendidikan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Sekolah penerima dana BOS saat ini diverifikasi oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk kemudian ditetapkan Kemdikbud melalui Surat Keputusan (SK). Kebijakan ini dilakukan untuk meminimalkan kesalahan data penerima sehingga dapat diterima sekolah yang benar-benar membutuhkan. Batas akhir pengambilan data dilakukan sekali per tahun setiap tanggal 31 Agustus untuk mencegah keterlambatan APBD-Perubahan.

## Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS

Penyaluran BOS Reguler diberikan berdasarkan capaian kinerja penyerapan berupa laporan realisasi penggunaan



Ilustrasi  
 Dimach Putra

melalui aplikasi penggunaan dana BOS yang dikelola oleh Kemdikbud. Selanjutnya, Kemdikbud menyampaikan rekomendasi penyaluran dana BOS Reguler kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.

Untuk penyaluran tahap I, rekomendasi paling lambat disampaikan bulan Juli dan untuk penyaluran tahap III, rekomendasi paling lambat disampaikan di minggu kedua bulan Desember. Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan rekomendasi tidak diterima maka penyaluran Dana BOS Reguler tidak dapat dilakukan.

Penggunaan dana BOS Reguler mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Sekolah memiliki kewenangan menentukan alokasi penggunaan dana BOS Reguler sesuai prioritas kebutuhan dengan memperhatikan prinsip manajemen berbasis sekolah. Perencanaan pengelolaan dana BOS

mengacu pada hasil evaluasi diri sekolah.

Alokasi dana BOS Reguler hanya digunakan untuk meningkatkan layanan pendidikan tanpa intervensi atau pemotongan dari pihak manapun. Penggunaannya juga harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS sekolah, guru, dan komite sekolah yang dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan dan disertai dengan tanda tangan.

Dana BOS juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru honorer dan tenaga kependidikan yang telah berdedikasi selama ini. Guru honorer yang dapat dibiayai dari dana BOS ini adalah guru yang statusnya sudah lama dan memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Dana BOS bisa dialokasikan untuk guru honorer maksimal 50 persen dari yang diterimanya (sebelumnya hanya maksimal 15 persen untuk guru honorer di sekolah negeri dan 30 persen di sekolah swasta). Kebijakan baru lainnya adalah tidak ada alokasi dana

BOS maksimal maupun minimal untuk pembelian buku dan alat multimedia dari yang sebelumnya dibatasi sebesar 20 persen.

Pemberian fleksibilitas penggunaan dana BOS ini harus diikuti dengan pelaporan penggunaan yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, Pemerintah tetap melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan sebab jumlah anggaran cukup besar dengan jumlah penerima yang banyak. Kebijakan alokasi, penyaluran, dan penggunaan yang baru untuk Dana BOS diharapkan mampu untuk meningkatkan mutu pendidikan kita. Dengan kualitas pendidikan yang baik diharapkan terbentuk Sumber Daya Manusia yang unggul dan mampu bersaing di kancah internasional.

\*Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan/perspektif institusi tempat penulis bekerja.

# Anggaran Pendidikan Demi Masa Depan



**S**esuai amanat institusi, alokasi anggaran pendidikan mendapatkan porsi sebesar 20% dari APBN. Alokasi tersebut saat ini berada di urutan teratas sebagai belanja negara paling besar dalam APBN. Setiap tahun alokasinya memiliki tren yang terus meningkat. Dalam RAPBN 2020 total anggaran di sektor tersebut mencapai Rp505,8 triliun. Alokasi anggaran pendidikan dengan nilai yang besar tersebut memang tidak langsung dikucurkan ke kementerian/lembaga terkait. Sekitar 60 persen akan disalurkan ke pemerintah daerah melalui dana alokasi khusus (DAK) nonfisik. Penggunaan DAK nonfisik diantaranya untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan tunjangan profesi guru. Pada 2020 ini pemerintah akan mengerucutkan konsentrasi pengembangan pendidikan dengan menitikberatkan ke akselerasi kualitas. Tentu, itu sejalan dengan rencana besar nasional, menuju Indonesia Emas 2045. Pendidikan berkualitas akan menghasilkan SDM yang berdaya saing tinggi.

Foto dan Teks  
Resha Aditya P

# Masa Depan Batu Bara dan Energi Terbarukan

Teks Ragimun dan Imran Rosjadi  
Pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI

**D**iprediksi, nasib batu bara akan semakin sulit bersaing dengan energi terbarukan jika tidak ada inovasi dan peningkatan nilai tambah (*value added*). Dengan kata lain, tidak dilakukan hilirisasi (*downstreaming*). Apalagi ke depan, pengembangan energi bersih, seperti energi baru dan terbarukan (EBT) semakin masif dan efisien. Di masa mendatang, pengusaha batu bara ditantang untuk terus melakukan berbagai inovasi dan pengembangan produk batu bara. Di lain pihak, timbul pertanyaan, apakah pemerintah sudah secara maksimal mendorong berbagai bentuk program hilirisasi batu bara. Memang beberapa regulasi pemerintah telah digulirkan, salah satunya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, yang di dalamnya menetapkan antara lain mengenai target bauran energi nasional. Pada tahun 2025 ditargetkan

peran EBT paling sedikit 20% dan peran batubara minimal 30%. Sementara pada tahun 2050 ditargetkan peran EBT melampaui batu bara, yakni paling sedikit 31%, sedangkan peran batubara minimal 25%.

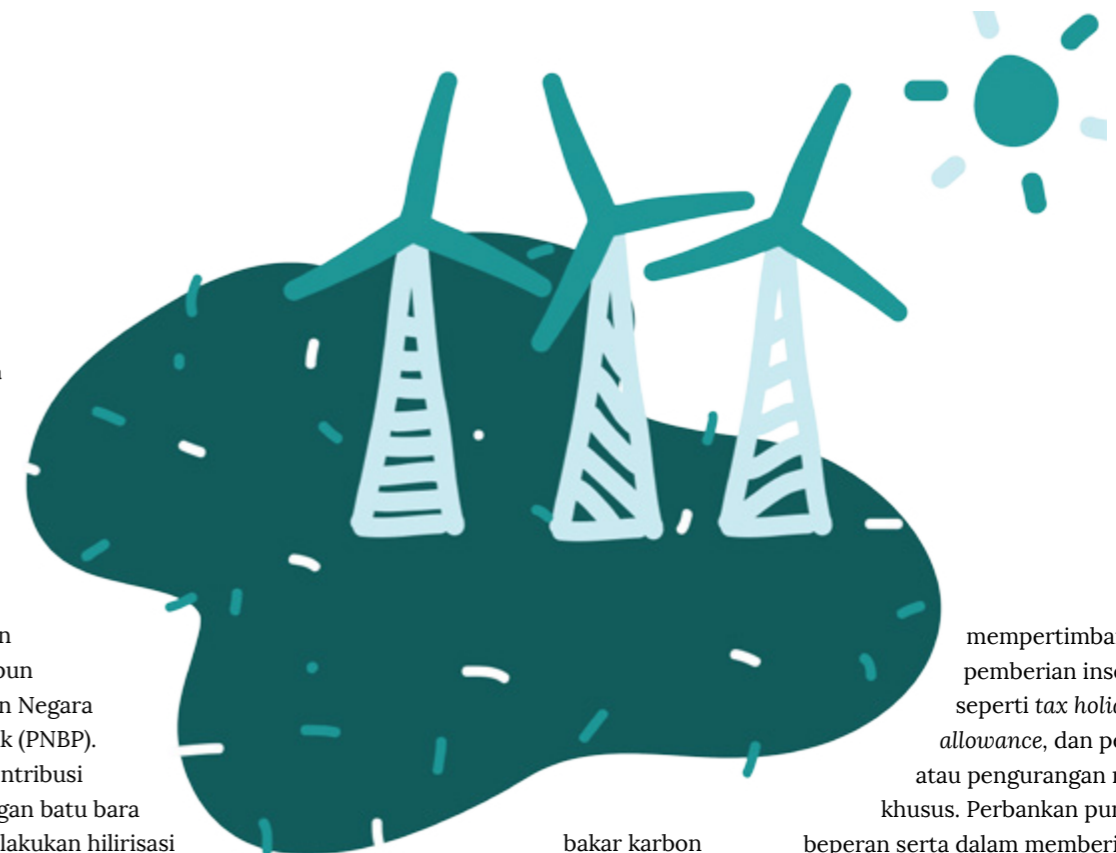
Perkembangan EBT yang makin pesat tentu membuat harga keekonomian EBT akan semakin kompetitif dibanding batu bara. Di sisi lain, penentangan para aktivis lingkungan terhadap efek polusi akibat penggunaan batu bara juga semakin mengemuka. Tak ayal, lambat laun peran batu bara sebagai sumber energi yang murah dan menjadikan batu bara bak buah simalakama. Di satu pihak, harganya terus menurun, dikonsumsi sekaligus ditentang dunia, dan bila tidak diproduksi maka potensi batu bara yang besar tidak dapat dioptimalkan. Akan tetapi, jika dilakukan hilirisasi, terdapat risiko bisnis yang cukup tinggi, baik dari segi teknis, regulasi, dan

pasar. Biaya investasi yang diperlukan pun cukup besar, begitu pula dengan pembiayaannya harus *bankable*.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan negara yang dikaruniai sumber daya alam yang melimpah, termasuk batu bara. Potensi kandungan sumber daya batu bara diperkirakan sangat besar, yakni mencapai 151 miliar ton dan cadangan batu bara sebesar 39 miliar ton. Kendati demikian, cadangan batu bara ini diperkirakan akan habis dalam 70 tahun yang akan datang (bila rasio cadangan dan produksi batu bara 4:1). Oleh sebab itu, seyogianya pengelolaan batu bara dilakukan dengan baik dan bijak agar dapat memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi masyarakat. Salah satu solusi agar pemerintah dapat terus mendorong pemanfaatan batu bara adalah melalui hilirisasi.

Hilirisasi batu bara dapat memberikan sumbangan untuk peningkatan penerimaan negara, baik

Ilustrasi  
A. Wirananda



penerimaan pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Saat ini, kontribusi penambangan batu bara sebelum dilakukan hilirisasi terbilang relatif tinggi terhadap PNBP. Pada tahun 2018 saja, PNBP batu bara mencapai lebih dari 21,85 triliun Rupiah. Dalam jangka pendek, pemberian insentif fiskal sebagai pendorong hilirisasi batu bara memang akan mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak dan bukan pajak. Akan tetapi, dalam jangka panjang diharapkan akan meningkatkan perekonomian dan manfaat sosial lainnya. Berdasarkan hasil simulasi yang pernah dilakukan, Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah atau lokasi hilirisasi diperkirakan meningkat 3 kali lipat. Sementara, untuk pajak dan PNBP rata-rata naik 3 kali lipat. Penyerapan tenaga kerja pun berpotensi mencapai lebih dari 5000 pekerja.

Hilirisasi yang paling memungkinkan untuk dilakukan pada saat ini adalah gasifikasi batu bara, yakni sebuah proses di mana bahan

bakar karbon mentah dioksidasi untuk menghasilkan produk bahan bakar gas lainnya. Gasifikasi sudah diminati oleh perusahaan BUMN tambang, misalnya PT Bukit Asam (PT BA) yang berencana menggandeng beberapa perusahaan user melalui *joint investment*, seperti PT Pertamina, PT Pupuk Indonesia dan PT Candra Asri. Penggunaan teknologi produksi batu bara menjadi gas berupa *Dymethyl Ether* (DME), urea dan *polypropylene* (PP) saat ini bukan masalah. Beberapa negara lain telah melakukan hal serupa, seperti Amerika Serikat, China, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Namun demikian, biaya produksi yang masih sangat tinggi menjadi kendala sehingga membutuhkan investasi yang relatif besar, dapat mencapai lebih dari 3.446 miliar Dollar.

Dibutuhkan dukungan segala pihak agar hilirisasi gasifikasi dapat berjalan lancar. Pemerintah dapat

mempertimbangkan pemberian insentif fiskal, seperti *tax holiday*, *tax allowance*, dan penurunan atau pengurangan royalti khusus. Perbankan pun ikut berperan serta dalam memberikan kredit investasi apabila proyek ini dinilai layak secara finansial. Selain itu, diperlukan juga kebijakan pengaturan atau penetapan harga beli DME untuk LPG oleh PT Pertamina yang tidak mengikuti fluktuasi harga komoditas. Dengan demikian, proyek industri bukan hanya *bankable* dan dapat berjalan, melainkan juga berkelanjutan sehingga program gasifikasi batu bara dapat bermanfaat untuk kepentingan industri strategis nasional, pasokan gas dalam negeri, penghematan devisa, dan pemanfaatan batu bara kalori rendah (*low rank*). Seluruh pemangku kepentingan perlu duduk bersama guna mencari solusi terbaik agar nantinya batu bara tidak lagi menjadi masalah, melainkan menjadi produk yang membawa berkah dan masalah.

\*Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja

# Karena Engkau Muda

Teks CS. Purwowidhu

**2** November 2019 merupakan hari bersejarah bagi Risa Santoso atau kerap disapa Risa, tatkala ia dilantik menjadi Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Tak pernah terbayang olehnya untuk mengemban tanggung jawab sebagai orang nomor satu di kampus. Nasihat sang ayah yang terus terngiang untuk tidak lelah belajar dan membagikan ilmu kepada orang lain menguatkan langkahnya dalam menjalankan amanah sebagai rektor, di usia yang baru beranjak 27 tahun.

## Tak ada yang Kebetulan

Dalam hidup ini tak ada yang terjadi secara kebetulan. Ungkapan ini menggambarkan perjalanan Risa, mulai dari lolos seleksi beasiswa magister LPDP sampai takdir membawanya pada karir saat ini. Buah ketekunan menempa diri dipertemukan dengan kesempatan-kesempatan baik yang terjadi pada waktu yang tepat. “Saat saya S2 di Harvard saya menghadiri acara Harvard Business School dengan Pak Luhut Binsar Pandjaitan sebagai narasumbernya. Di sanalah saya mengetahui bahwa ada kesempatan untuk mencoba bekerja di *public sector*,” kenang Risa. Setelah lulus kuliah, Risa langsung kembali ke Indonesia dan mendapat kesempatan menjadi Tenaga Ahli Muda di Kantor Staf

Presiden RI. Dalam perjalanannya, ia pun mendapat tawaran untuk membantu sebagai staff *business development* di sebuah *training company* di Surabaya. Disitulah ia pertama kalinya dikenalkan dengan Insitut Asia (yang sebelumnya adalah STIE & STMIC ASIA). Awalnya ia membantu paruh waktu, sebagai dosen, dan dilibatkan dalam Lembaga Penjaminan Mutu Internal. “Di sana saya melihat banyak peluang, misal untuk program-program yang melibatkan mahasiswa. Setelah itu, barulah saya diangkat sebagai Direktur Pengembangan Bisnis di kampus Asia,” tuturnya. Pada September 2019, kedua sekolah tinggi ASIA digabungkan menjadi institut lalu Risa dipilih sebagai salah satu kandidat rektor.

## Muda dan Berdaya

Bukanlah hal mudah mengemban amanah yang pada umumnya dikerjakan oleh generasi yang lebih tua. Akan tetapi Risa tidak mengalami kendala berarti dalam menjalani hari-harinya sebagai rektor termuda di Indonesia. Sebagai pemimpin, ia sadar betul akan perannya dan tantangan untuk menjaga hubungan kerja tetap dalam garis profesionalisme. Prinsip saling mendukung dan menghormati antar rekan kerja dijunjung tinggi olehnya. “Tentu *gap* usia baik umur maupun lamanya kerja menjadi perhatian tersendiri, di

situ letak tantangannya bagaimana cara kita berkomunikasi dengan efektif, tanpa melukai perasaan mereka,” ungkapnya. Dengan keahlian *people management* yang mumpuni, Risa tidak hanya menerapkan budaya terbuka di kampus yang ia pimpin, melainkan juga budaya kerja kolaboratif, di mana semua pihak saling bekerja sama tanpa melihat senioritas. Impian Risa untuk melihat pendidikan di Indonesia lebih hidup dan pemenuhan hak anak Indonesia atas pendidikan yang setara tanpa memandang latar belakang orang tua memotivasinya bergelut di dunia pendidikan.

Pengalaman selama berkuliah di Harvard University sejatinya bagi Risa tidak terukur oleh skala. “Di sana, banyak orang yang tidak hanya ingin sukses sendiri, melainkan saling mendukung satu sama lain—banyak juga yang punya motivasi untuk mengabdikan pada negara saat kembali,” tutur lulusan Master of Education, Learning and Teaching ini. Tempaan hidup selama menempuh studi di luar negeri bukan hanya memberinya bekal yang cukup dalam merintis karir dengan membuatnya lebih mandiri, tetapi juga memperluas jaringan global, serta memberinya kesempatan untuk belajar budaya dan etos kerja dari negara-negara lain. Sehari-hari ia dihadapkan dengan persaingan yang tajam di kelas kala itu. “Saya harus benar-benar serius mempersiapkan diri



Gedung Danadyaksa Cikini  
Jl. Cikini Raya no. 91 A-D Menteng  
Telp/Faks. (021) 3846474  
E-mail. [lpdp@depkeu.go.id](mailto:lpdp@depkeu.go.id)  
Twitter/Instagram. @LPDP\_RI  
Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI  
Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI



Risa Santoso,  
Rektor Institut  
Teknologi dan  
Bisnis Asia  
Malang

Foto  
Dok.  
Pribadi

di setiap kelas, termasuk beradaptasi dengan *reading requirement* yang tiap mata pelajaran memiliki bacaan lebih dari 50 halaman tiap harinya,” kenangnya.

## Berjalan dengan Visi

Tanpa visi dan perencanaan yang matang, tidak mungkin apa yang dicita-citakan dapat tercapai. Sebagai rektor, Risa tidak takut bermimpi besar bagi institut yang dipimpinnya. Ia ingin menjadikan Institut ASIA sebagai wadah bagi para mahasiswa untuk mengembangkan potensi mereka, terutama dalam bidang IT dan ekonomi. Institut ini juga berencana membangun berbagai *startup* melalui wadah Inkubator Bisnis ASIA. Perempuan yang mengidolakan Sri Mulyani Indrawati dan Tri Rismaharini ini berharap agar nantinya alumni Institut ASIA Malang dapat menjadi generasi PASTI, yakni Professional, Active, Smart, Tangguh & Inovatif, mampu memenangkan persaingan di dunia kerja, bahkan bisa

menciptakan lapangan kerja di era 4.0 ini. Salah satu strategi yang dilakukan yakni dengan membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan *internship* ke perusahaan di luar negeri selama satu bulan agar menjadi lebih mandiri dan memiliki wawasan yang lebih luas. “Saya menginisiasi Asia Hackaton dan program magang di luar negeri, serta mendorong mahasiswa untuk ikut berpartisipasi dalam pameran/expo internasional,” ujarnya.

## Harapan bagi Pendidikan Indonesia

Risa berpendapat, secara umum masih banyak yang harus dibenahi dari pendidikan di Indonesia. Dari segi literasi, hasil studi *The World's Most Literate Nations* yang dipublikasikan oleh Central Connecticut State University pada tahun 2016 menunjukkan Indonesia masih berada pada tingkat literasi rendah dengan peringkat ke-60 dari 61 negara yang diteliti. “Ini menyedihkan. Tugas kita bersama untuk memajukan bangsa ini,” ucapnya penuh harap. Risa

mengapresiasi kebijakan pemerintah saat ini mengenai pembelajaran interdisipliner serta masa *internship* yang lebih panjang. “Apabila perguruan tinggi diberi ruang dan insentif yang tepat, pastinya perkembangan akan terakselerasi,” tegasnya. Sebagai *awardee* LPDP, Risa juga berpesen bagi anak-anak muda yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri untuk tidak mudah menyerah dan ingat akan bangsa ini. “Raih mimpi dan cari ilmu sebanyak mungkin tapi jangan lupa untuk kembali ke tanah air dan memajukan bangsa,” pungkas perempuan asli Surabaya ini. Ke depan, Risa ingin terus mengembangkan dunia pendidikan di Indonesia, terutama di bidang IT. “Kita harus persiapkan SDM yang bukan sekadar mampu *survive*, melainkan juga mampu *thrive* di Industry 4.0, yang mana setiap insan dituntut untuk selalu kreatif dan inovatif dalam bekerja sehingga tidak tergantikan oleh mesin tapi justru punya daya inovasi yang kuat,” tuturnya lugas.

## KAIN SESEK, TENUN KHAS LOMBOK

Teks dan Foto Adhi Kurniawan

**I**ndonesia memiliki kekayaan budaya berupa aneka rupa kain tenun. Sebut saja kain ulos khas Batak, kain lurik Jawa, kain songket Palembang, atau tenun ikat Sumba. Di Lombok, kita bisa menemukan kain sesek.

Lombok memiliki kekayaan budaya dalam wujud kain tenun yang disebut kain sesek. Kain kebanggaan masyarakat Sasak ini telah menjadi identitas sejak beberapa abad silam. Kain sesek biasa dipakai sebagai baju tradisional yang dikenakan saat upacara adat. Saya mengunjungi daerah Sukarara yang dikenal sebagai sentra pembuatan kain tenun ini. Di desa yang terletak

tak jauh dari Bandara Internasional Lombok ini, kita bisa melihat langsung proses pembuatan kain sesek.

Di Desa Sukarara, saya melihat langsung proses pembuatan kain sesek yang tengah dikerjakan ibu-ibu warga lokal. Alat tenun tradisional diletakkan di pangkuan. Tangan mereka terampil memasukkan helai demi helai benang untuk dijadikan kain. Sembari bercerita tentang tenun sesek, sesekali mereka juga memberi kesempatan bagi wisatawan yang ingin mencoba alat tenun itu.

Motif yang digunakan pada kain sesek biasanya berupa rumah tradisional Sasak, lumbung padi, atau aneka binatang laut dan hewan ternak. Motif-motif tersebut dipilih karena dekat dengan keseharian masyarakat Sasak.

Pembuatan kain tenun sesek masih menggunakan cara tradisional dan bahan-bahan alami. Kapas yang dipintal menjadi benang berasal dari kapuk randu. Benang-benang yang sudah siap lantas diberi warna dengan bahan alami. Warna kuning diperoleh dari racikan kunyit, sementara warna hijau diperoleh dari perasan daun pandan. Motif yang akan dibuat tidak digambar terlebih dahulu di

kertas. Hanya dengan membayangkan di imajinasi masing-masing, para perajin kain sesek sanggup membuat kain tenun dengan hasil memukau.

Proses pembuatannya membutuhkan waktu cukup lama. Untuk menghasilkan sehelai tenun sesek berukuran 1 x 1,5 meter, seorang perajin memerlukan waktu antara dua minggu hingga satu bulan. Dengan tingkat kesulitan tinggi dan diperlukan ketelitian dalam setiap helai benangnya, dalam satu hari seorang perajin hanya mampu menenun sepanjang 15 cm. Itulah mengapa kain tenun sesek dijual dengan harga relatif mahal, dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah per helai. Semakin rumit motif yang digunakan serta semakin lama proses pembuatannya, tentu harganya akan semakin mahal. Ada nilai seni bercita rasa tinggi serta kerja keras berhari-hari dari sang perajin kain.

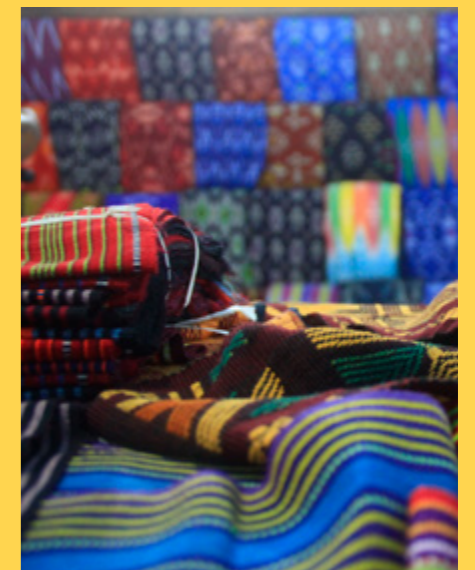
Bagi para gadis di Sukarara, kemampuan menenun kain sesek memiliki makna mendalam. Mereka baru boleh menikah setelah menguasai keterampilan menenun. Jika belum bisa menenun, jangan harap restu dari orang tua akan diberikan. Jika sudah terampil dan sanggup menyelesaikan pembuatan

kain tenun, mereka dianggap telah dewasa dan siap menikah. Selain itu, hasil penjualan kain sesek bisa digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Membuat kain sesek tidak boleh sembarang orang. Di Sukarara, membuat kain sesek hanya boleh dilakukan oleh kaum hawa. Menurut kepercayaan di sana, apabila seorang lelaki menenun kain sesek, dia akan menjadi mandul dan tidak memiliki keturunan.

Selain dijual dalam bentuk helaian, kain tenun sesek dikreasikan pula menjadi beberapa kerajinan tangan. Ada tas, dompet, pakaian adat, dan lain sebagainya. Kain sesek bisa juga dipasang di pigura dan dijadikan hiasan dinding yang cantik. Di Sukarara, pengunjung juga bisa meminjam kain sesek dan pakaian adat lainnya untuk berfoto. Dengan berpose di depan rumah adat Sasak, tentu hasil foto akan semakin menarik jika diunggah di media sosial.

Artikel dalam rubrik ini terbuka untuk umum. Kirimkan naskahmu ke alamat email [mediakeuangan@kemenkeu.go.id](mailto:mediakeuangan@kemenkeu.go.id) sertakan nama, alamat, dan no telepon.



# Middle Income Trap

Penghasilan naik, *gadget* diganti. Alasannya karena butuh untuk pekerjaan. Jabatan naik, mobil di-*upgrade*. Alasannya karena malu posisi sudah tinggi, mobilnya masih merek “masyarakat”. Dapat bonus, langsung beli barang *branded*. Alasannya sebagai *reward* karena telah bekerja keras. Ketika tabungan mulai banyak, langsung pergi liburan. Alasannya karena hidup itu harus selalu dinikmati.

Memberikan penghargaan terhadap diri sendiri sah-sah saja. Akan tetapi, jika itu dijadikan alasan terus menerus ketika mendapatkan penghasilan lebih, maka kalian akan masuk kategori kelas menengah abadi (*middle income trap*). Ciri-ciri individu yang terjebak di kelas menengah abadi adalah kenaikan penghasilan tidak diikuti dengan kenaikan aset, pengeluaran sekunder dan tersier lebih besar daripada

pengeluaran primer, pengeluaran empat kali *weekend* bisa mencapai 30% - 40% dari penghasilan, pembayaran kewajiban berupa cicilan konsumtif seperti kartu kredit lebih besar daripada menabung bulanan (itupun jika masih bisa menabung). Ciri yang lain adalah aset yang digunakan sendiri seperti mobil, rumah, apartemen, dan perhiasan lebih banyak daripada aset investasi (obligasi, saham, dst), dan minim atau bahkan tidak memiliki sama sekali dana yang likuid berupa simpanan tunai di tabungan, deposito, dll.

Jika Anda memiliki ciri-ciri di atas, ini saatnya untuk *wake up*. Mulailah mengelola keuangan dengan baik, dimulai dengan “berani melihat angka”. Jangan takut melihat angka. Jouska mengerti kok apa yang Anda pikirkan. “Sudah tau kok pengeluaranku banyak, tidak perlu dilihat lagi,” seringkali itulah yang ada di benak kita. Namun, kalau tidak dilihat, bagaimana kita bisa

tahu bocornya dimana dan bagaimana mencari solusinya.

Yuk mulai pelan-pelan atur *cash flow*. Rutinlah menabung dana darurat, lunasi utang satu per satu. Mulailah membeli asuransi jiwa dan asuransi kesehatan jika belum ada, serta carilah produk investasi yang sesuai dengan tujuan dan jangka waktu pencapaian. Mungkin di awal, langkah ini akan terasa berat bagi sebagian orang. Tetapi, jika sudah menciptakan kebiasaan maka ke depannya akan jauh lebih mudah. Anda pasti tidak mau kan bersenang-senangnya hanya saat ini saja? Atau Anda mau nanti ketika sudah tua, tidak bisa kemana-mana dan bergantung dengan orang lain? *Let's be financially smart!*

JOUSKA

# Mas Praim

## “KEPENTOK TIKTOK”

Cerita : Yani Kurnia A. Gambar : Ditto Novenska







HARI FILM INDONESIA  
30 MARET 2020

Foto  
Anas Nur Huda  
Resha Aditya P